



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Phillipus M. Hadjon. Yundika. Surabaya, 1993
- Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006,
- North, *Standar Pelayanan Publik*, Lembaga Administrasi Negara, 2009
- Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok-pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup. Jakarta
- Mudrajad Kuncoro, 2015, *Menulis Skripsi/Tesis dalam 60 Hari*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan.

- Peraturan Presiden Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU/2020
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



Pemendagri no 24 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 141 tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha

Peraturan Wali Kota Nomor 20 tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha

C. Skripsi/Jurnal/Penelitian



Bagir Manan, 1996, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung

Bagir Manan, Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul ditinjau dari Perspektif UUD 1945, Jakarta, 1995

Hasdinar, Implikasi Putusan MK no 91/PUU//2020 Tentang Pengujian Undang-undang Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Legislatif Vol 6 no 1, Desember 2022

Rifqy Maulana, SH. Dr. Jamhir, M.Ag. Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan, Jurnal Justisia Vol 3 No 1. 2018

Sjachran Basah, 1995, Pencabutan Izin salah satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pPenataran Hukum Administrasi Negara, Unair, Surabaya

Sjachran Basah, "Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan", Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH dan Bapedal 2-3 Mei, 1996

Nikita Kathryn Sianipar, 2019, Proses Perizinan Perseroan Terbatas Setelah Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

D. Internet

Alek Kurniawan. Bonus Demografi, *Modal Peningkatan Ekonomi Indonesia*.
<https://money.kompas.com/read/2019/08/30/17200826/bonus-demografi-modal-peningkatan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>



Fika Nurul Ulya. *Indonesia Posisi 7 Pertumbuhan Dagang Terbesar Dunia.*

money.kompas.com/read/2019/09/26/084615726/indonesia-posisi-7-pertumbuhan-dagang-terbesar-dunia

Flora L.Y. Barus. *Indonesia Punya Potensi Pertumbuhan Dagang Terbesar di*

Dunia. <https://www.gatra.com/detail/news/447034/ekonomi/indonesia-punya-potensi-pertumbuhan-dagang-terbesar-di-dunia>

Eddy Cahyono Sugiarto. *Investasi dan Indonesia Maju.*

https://setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju

Zakky. *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Beserta Definisinya.*

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-hukum/>

Bawono Yedika. *Kemudahan Berusaha RI Stagnan di Peringkat 73.*

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4094982/kemudahan-berusaha-ri-stagnan-di-peringkat-73-ini-kata-bank-dunia>

Husen Mulachela.

<https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/61286a8203934/omnibus-law-adalah-pengertian-dan-pasal->

[kontroversinya#:~:text=Pengertian%20Omnibus%20Law,mencakup%20banyak%20aturan%20di%20dalamnya.](https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/61286a8203934/omnibus-law-adalah-pengertian-dan-pasal-kontroversinya#:~:text=Pengertian%20Omnibus%20Law,mencakup%20banyak%20aturan%20di%20dalamnya.)